KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	GEGEN DIOSYA SURENDAGENI
NIK	:	3214012609660002
Lembaga	:	MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja	:	PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Sub Unit Kerja	:	PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA
Jabatan	:	SEKRETARIS
Jenis Laporan	:	Periodik - 2019
Tanggal Kirim	:	15 Januari 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

- [x] Lengkap
- [ ] Tidak Lengkap

**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | https://elhkpn.kpk.go.id

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2020-01-24 09:44:38

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : **YUDIKATIF**

LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG**

UNIT KERJA : **PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

SUB UNIT KERJA : **PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GEGEN DIOSYA SURENDAGENI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **552094**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	**Rp.**	**1.000.000.000**
1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/180 m2 di PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	**Rp.**	**438.000.000**
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA VIOS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
3. MOBIL, FORD SEDAN Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000		
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, WARISAN Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	**Rp.**	**----**
D. SURAT BERHARGA	**Rp.**	**----**
E. KAS DAN SETARA KAS	**Rp.**	**139.859.898**
F. HARTA LAINNYA	**Rp.**	**----**
Sub Total	**Rp.**	**1.577.859.898**
III. HUTANG	**Rp.**	**752.000.000**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	**Rp.**	**825.859.898**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta

kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.